





## 2) Pengurus

Ketua Umum : Puspo Handoko

Ketua 1 : Moch. Sholeh

Sekretaris Umum : Rochma Fitriyah, S.Ag.

Sekretaris : Qorimatul Fadillah

Bendahara Umum: Poniman

Bendahara : Ruswanto, S.E.

## 3) Pengawas

Ketua : Agus Setia Budi

Anggota : Moch. Bachrul Djayendhi

**B. Deskripsi Nadir**

Istilah nadir dalam masyarakat secara umum sering kali disamakan atau diidentikan dengan pengurus atau ta'mir masjid, dalam hal ini adalah Pengurus Masjid Al-Mustajabah, yang mana ketua ta'mir tersebut juga bertugas sebagai nadir.

Pada dasarnya siapapun berhak untuk menjadi nadir asalkan mampu bertindak sebagaimana aturan dalam hukum Islam dan aturan yang berlaku di daerah tersebut khususnya di Indonesia, menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanahkan oleh waqif. Kepada pihak Pengurus Masjid Al-Mustajabah sendiri menerima wakaf tersebut dan menunjuk nadir dari internal pengurus sendiri yang mana nadir tersebut juga menjabat sebagai ketua ta'mir Masjid Al-Mustajabah.

Peruntukan wakaf boleh untuk apa saja selama tidak melanggar syariat serta diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Wakaf yang ditujukan kepada Masjid Al-Mustajabah ini oleh waqif diperuntukkan untuk didirikan Sekolah Dasar, yang dibangun di tengah padatnya perkampungan Desa Tegalsari, yang tentunya dari waqif maupun pihak yang diberi wakaf butuh tenaga pembantu baik secara pemikiran, tenaga maupun finansial demi tercapainya tujuan tersebut. Hal ini dianggap perlu karena seorang nadir dituntut kreatif untuk mendapatkan ide-ide baru demi perkembangan harta wakaf.

### **C. Pelaksanaan Tugas Nadir**

#### **1. Bentuk penguasaan sepihak oleh nadir**

Masjid Al-Mustajabah yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an ini terletak di Jalan Pandigiling Tengah No. 19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Surabaya. Sedangkan objek wakaf yang berupa tanah sendiri berada tak jauh dari lokasi yang hanya berjarak 100 meter dari Masjid Al-Mustajabah.

Tentu peran nadir dalam menjalankan roda perwakafan mempunyai akibat yang sangat besar. Berkembang atau tidaknya harta wakaf yang diamanatkan oleh nadir sudah menjadi tugas yang harus diemban oleh nadir, sebab itulah siapapun yang ditunjuk menjadi nadir haruslah mempunyai gagasan yang bisa digunakan dan diperuntukkan untuk kemajuan pengelolaan harta wakaf. Tentu saja hal itu akan sulit terealisasi tanpa adanya sinergi dari semua pihak baik dari waqif,

*Mauqūf ‘alaih*, serta masyarakat sekitar harus ikut andil bersama, terlebih dari pihak pengelola (nadir) yang mana telah ditunjuk/diamanahi untuk mengelola barang wakaf yang telah diberikan oleh waqif.

Adapun penguasaan oleh nadir yang dimaksud adalah menganggap tanah wakaf dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut sebagai milik pribadi, dikuasai serta dikelola sebagaimana keinginannya tanpa sepengetahuan dan kesepakatan baik kepada waqif atau *Mauqūf ‘alaih* sebagai pihak yang diamanahi. Pengelolaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban terkait dengan keuangan yang keluar-masuk yang tidak diinformasikan kepada *Mauqūf ‘alaih*, keuntungan dan kerugian yang dialami oleh SD Mustajabah. Pengangkatan struktur kepengurusan SD Mustajabah yang sama sekali tidak dikomunikasikan kepada *Mauqūf ‘alaih* yang oleh nadir dengan sendirinya menunjuk anaknya “Bapak Ilyas” sebagai kepala sekolah dan memberikan beberapa jabatan kepada anggota keluarganya yang lain. Serta mendaftarkan SD Mustajabah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Surabaya juga tanpa berkomunikasi dengan *Mauqūf ‘alaih* ataupun ahli waris waqif.

“Tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Soekemi, yang berada di Jl. Pandegiling itu sebenarnya diberikan atau diwakafkan kepada Masjid Al-Mustajabah, bertujuan untuk mendirikan madrasah yang intinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana guna merawat dan mengembangkan masjid Al-Mustajabah. Waktu itu diwakili oleh ketua dan pengurus Masjid Al-Mustajabah dan waktu itu juga disepakati bahwa yang menjadi nadir











yang pada intinya penindaklanjutan atas kesepakatan Pernyataan Damai yang ditanda tangani dan diketahui pula oleh Pengurus Masjid Al-Mustajabah (yang pada waktu itu di jabat oleh Bapak Kosim) dan disaksikan oleh RT dan RW setempat, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Keputusan Bersama tertanggal 16 Juni 1987.

Berdasar Surat Pernyataan Damai dan Surat Pernyataan Keputusan Bersama yang dimaksud ternyata tidak dilaksanakan oleh Bapak Malar, sehingga menimbulkan permasalahan kembali antara Para Ahli Waris dari Bapak Soekemi, Pengurus Masjid Al-Mustajabah dengan Bapak Malar maupun Bapak Ilyas, dimana Bapak Malar dan Bapak Ilyas tetap tidak pernah membuat laporan pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan oleh SD Mustajabah, sehingga hal tersebut melenceng dari Amanat pewakaf (Bapak Soekemi) dan sekaligus pernyataan damai yang telah dibuat.

Terkait perkembangan permasalahan tersebut juga berimbas pada pendidikan yang berlangsung. Tahun 2012 dari pihak Masjid memblokir SD Al-Mustajabah di Dinas Pendidikan dan tentunya semua yang menuju maupun berkaitan dengan SD Al-Mustajabah tidak bisa dilanjutkan, seperti penyaluran dana BOS. Karena merasa terdesak, Pak Ilyas selaku Kepala Sekolah SD Al-Mustajabah mulai merapat ke pihak Masjid dan meminta untuk mencabut pemblokiran sekolah. “Mungkin karena bingung ya Mas, dia mulai merapat ke Masjid. Meminta kami mencabut blokir itu dan berjanji akan mengembalikan tanah itu. La karena kasihan, apalagi murid-muridnya yang gak salah ya Mas, kami cabut lah itu pemblokiran.





